



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 050/Kep.535-BP4D/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUBANG NOMOR
050/Kep.42-BP4D/2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017-2018

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam Pasal 14,
“Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
melakukan koordinasi dan pemantauan dalam
pengembangan dan penetapan indikator kinerja
utama di lingkungan instansi pemerintah”;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Subang Tahun 2017-2018, perlu mengubah
Keputusan Bupati Subang Nomor 050/Kep.42-
BP4D/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun
2017-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Subang Nomor
050/Kep.42-BP4D/2017 tentang Indikator Kinerja
Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang
Tahun 2017-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2014–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);

12. Keputusan Bupati Subang Nomor 050/Kep.42-BP4D/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2017-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Subang Nomor 050/Kep.42-BP4D/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2017-2018, pada Lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 20 November 2017



BUPATI SUBANG,

EMAS ARYUMNINGSIH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUBANG NOMOR 050/Kep.42-BP4D/2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017-2018

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017-2018

Sasaran strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai yang diperoleh atas evaluasi SAKIP oleh KemenPAN dan RB	Inspektorat Daerah	Hasil Penilaian Sakip oleh Kemenpan RB
		2.	Nilai EKPPD	Nilai yang diperoleh atas evaluasi LPPD oleh Kemendagri	Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian EKPPD oleh Kemendagri
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	3.	Opini BPK atas hasil pemeriksaan keuangan	Opini BPK-RI yang diperoleh atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Hasil Penilaian LK oleh BPK
3.	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat Daerah	Survey IKM
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	5.	Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP	Inspektorat Daerah	Hasil Penilaian SPIP oleh BPKP
5.	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang	6.	Persentase ruas jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah ruas jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah ruas jalan yang ada}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Database Jalan dan Jembatan

Sasaran strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		7.	Persentase irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas daerah irigasi yang dapat diairi jaringan irigasi teknis}}{\text{Luas daerah irigasi yang ada}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Database Infrastruktur
6.	Berkembangnya koperasi dan UMKM	8.	Persentase peningkatan Sisa Hasil Usaha	$\frac{\text{Jumlah SHU tahun n} - \text{jumlah SHU tahun n-1}}{\text{Jumlah SHU tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Laporan SHU
		9.	Persentase peningkatan omzet UMKM	$\frac{\text{Jumlah omzet tahun n} - \text{jumlah omzet tahun n-1}}{\text{Jumlah omzet tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Laporan UMKM
7.	Meningkatnya investasi	10.	Nilai Investasi PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kemajuan Penanaman Modal
		11.	Nilai Investasi PMA	Nilai Realisasi Investasi PMA		
8.	Meningkatnya daya saing pariwisata	12.	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan dalam 1 tahun	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Profil Pariwisata
9.	Meningkatnya produksi pertanian	13.	Jumlah produksi padi	Jumlah produksi padi dalam 1 tahun	Dinas Pertanian	Laporan UPTD Pertanian

Sasaran strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
10.	Meningkatnya ketersediaan pangan	14.	Skor Pola Pangan Harapan	$\frac{\% \text{ Angka Kecukupan Energi}}{\text{Angka Kecukupan Gizi setiap golongan bahan pangan}} \times \text{Bobot setiap golongan bahan pangan}$	Dinas Ketahanan Pangan	Statistik Pertanian
11.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	15.	Persentase KK miskin	$\frac{\text{Jumlah KK miskin}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$	Dinas Sosial	Statistik Kab. Subang
12.	Meningkatnya kesempatan kerja	16.	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indikator Makro
13.	Meningkatnya derajat pendidikan	17.	Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)	$\frac{\text{Jumlah penduduk} \times \text{lama pendidikan yang dihabiskan}}{\text{Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang sedang bersekolah/telah berijazah}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Statistik Pendidikan
		18.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$\text{Faktor koreksi pesantren} \times \sum \frac{\text{Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t}}{\text{Jumlah penduduk usia I pada tahun t}}$ <p>I=Usia 7 tahun ke atas</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Statistik Pendidikan

Sasaran strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
14.	Meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban di masyarakat	19.	Persentase penurunan konflik horizontal	$\frac{\text{Jumlah konflik horizontal tahun } n - \text{jumlah konflik horizontal tahun } n-1}{\text{Jumlah konflik horizontal tahun } n-1} \times 100\%$	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan Tahunan Kantor Kesbangpol
		20.	Persentase penurunan pelanggaran terhadap PERDA	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran PERDA tahun } n - \text{jumlah pelanggaran PERDA tahun } n-1}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA tahun } n-1} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Statistik Kab. Subang
15.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	21.	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah pengaduan kekerasan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kekerasan perempuan dan anak}} \times 100\%$	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan Tahunan DP2KBP3A
16.	Meningkatnya pelestarian seni dan budaya	22.	Jumlah festival kesenian dalam satu tahun	Jumlah festival kesenian dalam satu tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Statistik Kab. Subang
17.	Meningkatnya derajat kesehatan	23.	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kasus Kematian Ibu dalam 1 tahun	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan
		24.	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun dalam satu tahun	Dinas Kesehatan	

Sasaran strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		25.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk dalam kurun waktu 1 tahun ----- x 100% Jumlah balita yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan	Statistik Kesehatan
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	26.	Penanganan Sampah Perkotaan	Volume sampah yang ditangani ----- x 100% Volume produksi sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
		27.	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan	Luas RTH ----- x 100% Luas wilayah ber-HPL/HGB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan Tahunan Dinas PUPR

